

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS ZERO WASTE: STUDI PADA UPAYA
PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
FAHREZA ZITA AZZAHRA
NPM 2416041108



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Kebijakan Publik	15
2.2.2 Teori Sistem Politik David Easton	16
2.2.3 Teori Tahapan Kebijakan (James Anderson, 2014).....	17
2.2.4 Konsep Zero Waste	18
2.2.5 Partisipasi Masyarakat	18
2.2.6 Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana.....	18
2.2.7 Efektivitas Implementasi Kebijakan	19
2.3 Kerangka Pikir	19
III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
DAFTAR PUSTAKA	36

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang paling dominan dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah rumah tangga adalah limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga seperti sampah dapur, sisa makanan, kertas, plastik, ataupun sampah lainnya yang bukan tinja atau sampah spesifik. Menurut World Bank (2021), sampah rumah tangga atau municipal solid waste (MSW) adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, area komersial, dan institusi non-industri, yang meliputi sisa makanan, kertas, plastik, logam, kaca, kain, dan material sejenis lainnya. Secara umum, sampah rumah tangga dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayuran, buah, daun, dan ranting. Jenis sampah ini berpotensi diolah menjadi kompos atau biogas. Kedua, sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, kertas, dan kaleng, yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Ketiga, sampah berbahaya rumah tangga atau *household hazardous waste* (HHW), misalnya baterai bekas, lampu neon, obat kadaluarsa, hingga pestisida, yang memerlukan penanganan khusus karena dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia.

Isu sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan seperti Bandar Lampung. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat modern telah meningkatkan volume timbulan sampah rumah tangga secara signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (2023), timbulan sampah di kota ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022 tercatat produksi sampah harian mencapai sekitar 840 ton per hari, dan pada 2023 naik menjadi sekitar 850 ton per hari. Bahkan pada periode tertentu, seperti libur panjang atau bulan Ramadan, jumlahnya bisa melonjak hingga 1.000 ton per hari. Jika dihitung secara tahunan, timbulan sampah di Bandar Lampung mencapai lebih dari 317 ribu ton pada 2024. Data penelitian lain juga menunjukkan bahwa timbulan sampah harian di Bandar Lampung berada pada kisaran 750–800 ton per

hari atau sekitar 292 ribu ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 92,82% diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara 2,46% dibuang langsung ke lingkungan, dan tingkat pengurangan sampah baru mencapai 4,72%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun volume sampah sangat besar, upaya pengurangan melalui program pemilahan, bank sampah, atau pengolahan masih jauh dari optimal. Dengan kondisi tersebut, permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung bukan hanya menyangkut aspek teknis pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk program Zero Waste yang seharusnya menekankan pengurangan sejak dari sumber. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi lingkungan, sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara, bahkan sampah plastik yang sulit terurai dapat bertahan hingga ratusan tahun di alam. Timbunan sampah organik di tempat pembuangan akhir (TPA) juga berpotensi menghasilkan gas metana yang memperparah efek rumah kaca. Dari aspek kesehatan, sampah menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk, yang dapat menimbulkan penyakit diare, demam berdarah, hingga infeksi kulit. Secara sosial-ekonomi, timbunan sampah menimbulkan ketidaknyamanan, merusak estetika lingkungan, dan bahkan memicu konflik sosial seperti penolakan warga terhadap keberadaan TPA.

Dalam konteks kebijakan lingkungan modern, konsep Zero Waste semakin banyak diterapkan sebagai solusi pengelolaan sampah rumah tangga. Zero Waste menekankan pada prinsip bahwa sampah bukanlah sesuatu yang dibuang, melainkan sumber daya yang masih memiliki nilai guna. Konsep ini hadir sebagai pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat dari *linear economy* (ambil-pakai-buang) menuju *circular economy* yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Zero Waste merupakan strategi yang menekankan pada upaya pengurangan sampah sejak dari sumber, melalui penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), pemilahan yang disiplin, pengomposan sampah organik, hingga meminimalkan residu yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut Zero Waste International Alliance (ZWIA, 2018), Zero Waste didefinisikan sebagai “desain dan pengelolaan produk serta proses untuk menghindari dan mengeliminasi volume serta toksisitas sampah dan material, serta untuk melestarikan semua sumber daya tanpa dibakar atau

ditimbun di tanah.” Definisi ini menegaskan bahwa Zero Waste tidak hanya sekedar mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menuntut adanya perubahan sistemik dalam pola produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan material.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan timbunan sampah sebesar 30% dan peningkatan penanganan sampah hingga 70% pada tahun 2025. Target tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan sampah di lingkungan kota Bandar Lampung yang semakin kompleks. Pencapaian target tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya teknis semata, tetapi juga strategi penting dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah. Dengan demikian, program Zero Waste diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis karena tidak hanya mendukung implementasi Jakstranas, tetapi juga berkaitan langsung dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan serta tujuan ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai mengadopsi pendekatan Zero Waste dalam mengelola sampah rumah tangga. Program-program tersebut bervariasi mulai dari pembentukan Bank Sampah, keberadaan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di tingkat komunitas, pengembangan eco-village yang menanamkan kesadaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, hingga penerapan kebijakan pemilahan sampah rumah tangga secara langsung. Bank Sampah sendiri merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, di mana warga dapat menabung sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi seperti plastik, kertas, atau logam, kemudian ditukar dengan uang atau barang kebutuhan. Konsep ini tidak hanya mendorong pemilahan sampah sejak dari sumber, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, *eco-village* adalah konsep desa atau komunitas ramah lingkungan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas sehari-hari, seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah rumah tangga, hingga pertanian organik, sehingga mampu menciptakan budaya peduli lingkungan di tingkat lokal. Sedangkan urban farming merupakan praktik pertanian perkotaan yang

memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah atau fasilitas publik untuk menanam sayuran, buah, maupun tanaman obat. Urban farming tidak hanya membantu mengurangi sampah organik melalui pengomposan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan keluarga dan komunitas.

Di Kota Bandar Lampung, upaya pengelolaan sampah berbasis Zero Waste juga mulai diterapkan, meskipun masih menghadapi tantangan besar. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah mendorong pembentukan Bank Sampah Induk dan sejumlah Bank Sampah Unit di tingkat kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program TPS 3R di beberapa kecamatan, meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan volume sampah harian yang mencapai lebih dari 800 ton per hari. Di beberapa wilayah, komunitas masyarakat dan kelompok swadaya mulai mengembangkan urban farming berbasis pengomposan sampah organik rumah tangga sebagai bagian dari gerakan ketahanan pangan keluarga. Namun, pengelolaan sampah di Bandar Lampung masih terkendala karena mayoritas sampah (lebih dari 90%) masih berakhir di TPA Bakung dengan metode open dumping, sehingga kontribusi Bank Sampah dan TPS 3R baru menyumbang sebagian kecil dalam pengurangan timbulan sampah kota. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada inisiatif Zero Waste, implementasinya masih perlu diperkuat melalui dukungan regulasi, infrastruktur, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Namun demikian, implementasi program Zero Waste di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (2023), timbulan sampah di kota ini mencapai sekitar 850 ton per hari, dengan sebagian besar (lebih dari 90%) masih berakhir di TPA Bakung. Kondisi TPA Bakung saat ini sudah dalam keadaan overload karena menampung sampah dari seluruh wilayah kota selama puluhan tahun. Lahan yang terbatas membuat gunung sampah semakin meninggi dan menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Salah satu persoalan utama adalah bau menyengat yang mencemari udara hingga ke pemukiman warga di sekitar lokasi, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memicu berbagai keluhan kesehatan. Selain itu, praktik pengelolaan dengan metode open dumping menyebabkan pencemaran air lindi yang berpotensi meresap ke tanah dan sungai di sekitarnya.

Kontribusi program pengurangan sampah seperti Bank Sampah, TPS 3R, maupun inisiatif komunitas masih sangat terbatas, yakni hanya sekitar 4–5% dari total timbulan sampah kota. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, keterbatasan anggaran daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang modern, lemahnya regulasi serta penegakan hukum terkait kewajiban pemilahan sampah, serta masih terbatasnya fasilitas pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan. Sebagai contoh, meskipun pemerintah telah mendorong pembentukan ratusan unit Bank Sampah di kelurahan, sebagian besar hanya aktif secara administratif dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah harian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang sudah dicanangkan dengan implementasi di lapangan, sehingga target pengurangan sampah berbasis Zero Waste di Bandar Lampung masih sulit tercapai.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi dalam penerapan program Zero Waste adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi. Sebagian besar masyarakat di Bandar Lampung masih memiliki pola pikir bahwa sampah merupakan urusan pemerintah semata, bukan tanggung jawab bersama. Pola pikir ini membuat sebagian warga kurang peduli terhadap proses pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, sehingga volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetap tinggi. Rendahnya kesadaran ini juga tampak dari minimnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemilahan organik, anorganik, dan residu, padahal pemilahan merupakan langkah paling mendasar dalam mendukung tercapainya konsep Zero Waste. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kesadaran adalah kurangnya edukasi berkelanjutan, keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, serta lemahnya penegakan aturan di tingkat lokal.

Jika dibandingkan dengan pengalaman di beberapa negara maju, khususnya Jepang, terlihat jelas perbedaan mendasar dalam budaya dan perilaku masyarakat. Jepang berhasil menerapkan konsep Zero Waste bukan hanya karena adanya kebijakan dan regulasi pemerintah yang ketat, tetapi juga karena masyarakat memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga.

Misalnya, setiap keluarga di Jepang diwajibkan memisahkan sampah berdasarkan kategori yang sangat detail, seperti sampah plastik, kertas, kaleng, botol kaca, hingga sampah berbahaya, dan aturan ini dipatuhi dengan kesadaran kolektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Zero Waste tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran dan kedisiplinan warga merupakan faktor kunci yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam hal ini, evaluasi kebijakan publik menjadi aspek penting. Seperti dikemukakan oleh Dye (2013), kebijakan publik pada hakikatnya merupakan “apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya terbatas pada adanya regulasi formal atau program yang dirancang, melainkan juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan dalam menghadapi suatu persoalan. Dengan kata lain, setiap pilihan pemerintah, baik berupa aksi maupun inaksi, memiliki konsekuensi tertentu bagi masyarakat. Pemahaman ini menekankan bahwa keberadaan kebijakan publik baru dapat dinilai bermakna apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting, sebab keberhasilan suatu kebijakan tidak diukur hanya dari ada atau tidaknya aturan tertulis, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta relevan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks program Zero Waste, pandangan Dye ini menjadi sangat relevan. Pemerintah telah memilih untuk melakukan intervensi melalui lahirnya kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa keterlambatan implementasi di daerah, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi yang dapat dimaknai sebagai bentuk “tidak dilakukan.” Oleh karena itu, efektivitas kebijakan Zero Waste harus dievaluasi bukan hanya dari sisi keberadaan regulasi, tetapi juga dari hasil nyatanya, seperti penurunan timbulan sampah rumah tangga, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, serta kontribusi kebijakan tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perspektif Dye mengingatkan bahwa kebijakan publik sejatinya tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau

dokumen semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dari perspektif Administrasi Publik, analisis kebijakan Zero Waste berkaitan erat dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Efektivitas berarti sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi menilai perbandingan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh. Akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen fundamental karena pengelolaan sampah rumah tangga tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan aktif warga.

Selain itu, kebijakan Zero Waste memiliki relevansi dengan agenda pembangunan global, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan tujuan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Melalui upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya, Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mampu mengurangi ketergantungan pada TPA Bakung yang kondisinya saat ini sudah penuh. Namun demikian, pencapaian tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, dukungan anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Bandar Lampung menjadi penting dilakukan, terutama untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya di tingkat lokal.

Secara teoritis, analisis kebijakan ini dapat dijelaskan dengan kerangka sistem politik David Easton. Menurut David Easton, kebijakan publik dapat dipahami melalui alur sistem politik yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback. Dalam konteks program Zero Waste, input muncul dari berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat, misalnya meningkatnya volume sampah rumah tangga, keluhan warga karena tumpukan sampah, liputan media, hingga tekanan dari organisasi lingkungan dan target pembangunan berkelanjutan. Semua hal ini menjadi desakan agar pemerintah mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, input ini masuk ke tahap proses konversi, yaitu bagaimana pemerintah daerah dan lembaga terkait mengubah tuntutan tersebut menjadi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan aturan, penyusunan program

seperti bank sampah, TPS3R, dan edukasi masyarakat. Namun, di sinilah sering muncul hambatan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur, serta kepentingan politik yang membuat kebijakan belum berjalan optimal.

Hasil dari proses tersebut adalah output, yaitu kebijakan atau program yang telah disahkan, contohnya Peraturan Presiden tentang Jakstranas atau Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah. Output ini diharapkan bisa memberi arahan jelas, memiliki dukungan anggaran, serta mampu dilaksanakan di lapangan. Setelah kebijakan berjalan, akan muncul feedback, yaitu tanggapan dari masyarakat, hasil monitoring pemerintah, atau evaluasi dari lembaga terkait. Misalnya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menunjukkan bahwa capaian pengurangan sampah masih sekitar 13,47% dari target nasional. Feedback ini penting sebagai bahan evaluasi agar kebijakan bisa diperbaiki ke depannya.

Dari kerangka Easton ini dapat dipahami bahwa keberhasilan program Zero Waste tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya kebijakan, tetapi juga pada bagaimana sistem politik bekerja secara menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa input masyarakat benar-benar ditangkap, proses perumusan kebijakan dilakukan secara partisipatif dan realistis, output disertai anggaran serta infrastruktur yang memadai, dan feedback digunakan secara serius untuk memperbaiki program. Dengan begitu, kebijakan Zero Waste dapat lebih efektif dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga di perkotaan.

Jika dianalisis dengan menggunakan kerangka James Anderson, program Zero Waste dapat dipahami melalui lima tahapan kebijakan publik yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah agenda setting, ketika isu sampah rumah tangga masuk ke dalam agenda nasional karena dianggap sebagai masalah krusial yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, tahap policy formulation ditandai dengan perumusan berbagai instrumen kebijakan, seperti adanya Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah, pengembangan bank sampah, TPS 3R, hingga kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya. Setelah perumusan selesai, masuk ke tahap policy adoption, yakni proses pengesahan dan penerapan kebijakan melalui regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah agar memiliki dasar hukum yang kuat. Tahap berikutnya adalah policy implementation, yang melibatkan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjalankan berbagai

program Zero Waste melalui kegiatan pengurangan, pemilahan, serta pengolahan sampah. Terakhir, pada tahap policy evaluation, hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) menunjukkan bahwa capaian pengurangan sampah secara nasional baru sekitar 13,47%, angka yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dari analisis ini terlihat bahwa titik lemah kebijakan Zero Waste terutama berada pada tahap implementasi dan evaluasi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini memiliki arah yang jelas, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu segera ditangani.

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan publik, program Zero Waste memiliki landasan regulasi yang kuat dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong partisipasi masyarakat, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta membangun mekanisme evaluasi yang berkesinambungan. Tanpa adanya perbaikan pada aspek implementasi dan evaluasi, kebijakan Zero Waste berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa memberikan dampak nyata dalam menekan timbulan sampah rumah tangga di perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung bukan hanya sekedar persoalan teknis, melainkan juga terkait dengan efektivitas kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Di satu sisi, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi dan program untuk mengurangi timbulan sampah, namun di sisi lain implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik inilah yang menjadikan isu Zero Waste menarik untuk diteliti, khususnya dari perspektif Administrasi Publik. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Publik tentang Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Zero Waste: Studi pada Upaya Pengurangan Sampah di Kota Bandar Lampung” ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan, serta faktor apa saja

yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasinya. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan publik tentang program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi program Zero Waste dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Zero Waste di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan kebijakan publik tentang program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung.
2. Menganalisis implementasi program Zero Waste dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Zero Waste.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini akan menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik di bidang lingkungan, khususnya terkait program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste. Penelitian ini juga bermanfaat dalam mengasah kemampuan analisis kritis, keterampilan metodologis (seperti wawancara, observasi, dan analisis data kualitatif), serta memperluas wawasan mengenai hubungan antara kebijakan, masyarakat, dan tantangan lingkungan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan strategi serta kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Temuan lapangan yang diperoleh dari penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata tentang kendala dan potensi di masyarakat, sehingga kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

3. Bagi Masyarakat dan Komunitas Lingkungan

Masyarakat dapat memperoleh pemahaman lebih baik mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam program Zero Waste. Penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi atau contoh praktik baik yang bisa diterapkan secara mandiri di lingkungan mereka. Bagi komunitas lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan sekaligus referensi untuk memperkuat program edukasi, advokasi, dan kampanye lingkungan.

4. Bagi Dunia Akademis

Dalam ranah akademis, penelitian ini menambah literatur mengenai implementasi kebijakan publik di sektor lingkungan, khususnya yang terkait dengan isu pengelolaan sampah perkotaan. Konsep Zero Waste dapat diperkaya dari sisi teori maupun praktik, sehingga membuka ruang diskusi baru dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting untuk memperkuat dasar penelitian. Isu pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, baik di tingkat nasional maupun lokal. Beberapa diantaranya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, ada pula yang menyoroti keterbatasan sarana prasarana dan dukungan anggaran, sementara sebagian lainnya menilai efektivitas program melalui inovasi kebijakan daerah. Beberapa penelitian yang relevan dengan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Suryani (2020)	Implementasi Kebijakan Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung	Implementasi kebijakan pemilahan sampah rumah tangga, terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan minim fasilitas	Fokus pada implementasi kebijakan di Bandung, bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian saya berbeda karena menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur pengaruh partisipasi, anggaran, dan sarana prasarana terhadap efektivitas kebijakan Zero Waste di Bandar Lampung.
2.	Putri & Kurniawan (2021)	Inovasi Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Zero Waste di	Inovasi pengelolaan sampah Zero Waste di Surabaya melalui Bank Sampah & TPS 3R, efektif bila	Fokus Surabaya dengan inovasi program, bersifat kualitatif. Penelitian saya menekankan pada faktor-faktor kuantitatif yang

		Surabaya	ada dukungan regulasi dan partisipasi warga	mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di Bandar Lampung.
3.	Supinganto dkk. (2021)	Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga	Penerapan Zero Waste di tingkat rumah tangga mandiri mampu mengurangi timbunan sampah hingga 30% melalui prinsip 3R, pemilahan sampah, dan pemanfaatan kompos. Penelitian menegaskan pentingnya peran perilaku individu/keluarga.	Fokus penelitian hanya pada lingkup rumah tangga mandiri, sehingga hasilnya lebih menekankan pada perubahan perilaku individu atau keluarga. Sementara itu, penelitian saya memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu tingkat kota Bandar Lampung, dan tidak hanya mendeskripsikan perilaku, tetapi juga menguji secara kuantitatif bagaimana partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, serta ketersediaan sarana prasarana mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Zero Waste.
4.	Sujatmiko, Juwita & Wisnaningsih (2022)	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Bakung, Bandar Lampung	Pengelolaan sampah di Kelurahan Bakung, Bandar Lampung. Pengelolaan sampah menghadapi kendala pada	Fokus pada satu kelurahan di Bandar Lampung dengan pendekatan kualitatif. Penelitian saya mencakup lingkup kota Bandar Lampung secara keseluruhan, menggunakan pendekatan kuantitatif, dan menguji

			keterbatasan sarana prasarana (TPS, tempat sampah terpilah, armada angkut) dan peran Bank Sampah yang belum optimal. Akibatnya, efektivitas pengelolaan sampah masih rendah.	pengaruh partisipasi, anggaran, serta sarana prasarana terhadap efektivitas kebijakan Zero Waste.
5.	Fania Lestari Widya Putri (2023)	Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Batu Menuju Zero Waste	Program Zero Waste di Kota Batu didukung pemerintah dan SDM yang memadai, namun terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta penggunaan produk sekali pakai. Solusi dilakukan dengan penutupan TPA, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pihak swasta.	Fokus penelitian di Kota Batu dan menitikberatkan pada implementasi program oleh DLH. Penelitian saya berbeda karena menggunakan metode kuantitatif, dengan fokus pada faktor anggaran, partisipasi masyarakat, dan sarana prasarana dalam efektivitas kebijakan Zero Waste di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Mayoritas penelitian sebelumnya menekankan pada partisipasi masyarakat sebagai faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Rendahnya kesadaran dan disiplin memilah sampah menjadi hambatan umum di berbagai daerah.

2. Faktor sarana dan prasarana juga berulang kali muncul sebagai tantangan, misalnya keterbatasan jumlah TPS 3R, Bank Sampah, dan fasilitas pemilahan.
3. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan anggaran menjadi penentu efektivitas implementasi, karena tanpa dana yang cukup program Zero Waste sulit dijalankan secara konsisten.
4. Penelitian di Surabaya (Putri & Kurniawan, 2021) dan Bandung (Suryani, 2020) menekankan pentingnya inovasi dan regulasi, sedangkan penelitian di Bandar Lampung (Sujatmiko dkk., 2022) memberikan konteks lokal yang langsung berkaitan dengan penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah (research gap) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, dan ketersediaan sarana prasarana mempengaruhi efektivitas implementasi program Zero Waste di Kota Bandar Lampung melalui analisis deskriptif dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Dye (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Definisi ini mengandung makna bahwa setiap tindakan atau ketidakaktifan pemerintah memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Anderson (2014) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang dikembangkan oleh aktor atau kelompok aktor pemerintah untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berhenti pada perumusan dokumen formal, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi nyata yang memberi dampak pada kesejahteraan publik.

Kebijakan publik juga mencerminkan adanya interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam perspektif ini, kebijakan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, suatu kebijakan hanya dapat dikatakan efektif apabila mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta berkelanjutan dalam implementasinya. Dalam penelitian ini, kebijakan publik terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk menjawab persoalan lingkungan yang semakin kompleks, terutama akibat peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat perkotaan. Melalui kebijakan Zero Waste, pemerintah daerah berupaya mengarahkan perilaku masyarakat agar lebih disiplin dalam memilah sampah, mendorong praktik 3R (*reduce, reuse, recycle*), serta memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan TPS 3R.

2.2.2 Teori Sistem Politik David Easton

David Easton memandang kebijakan publik sebagai sebuah produk dari sistem politik yang bekerja dalam siklus berkesinambungan. Menurutnya, sistem politik tidak berdiri sendiri, melainkan selalu menerima masukan dari lingkungannya dan mengeluarkan keluaran yang kembali memengaruhi lingkungan. Ada empat unsur utama dalam model ini, yaitu input, proses konversi, output, dan feedback.

Pertama, input adalah tuntutan dan dukungan yang berasal dari masyarakat maupun kelompok kepentingan. Dalam konteks pengelolaan sampah, input dapat berupa keluhan masyarakat terhadap meningkatnya volume sampah rumah tangga, aspirasi untuk memiliki lingkungan yang lebih bersih, tekanan dari media terkait pencemaran, maupun dukungan dari komunitas lingkungan hidup. Input inilah yang menjadi bahan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan publik.

Kedua, proses konversi menggambarkan bagaimana tuntutan masyarakat diproses oleh sistem politik dan diubah menjadi kebijakan konkret. Dalam pengelolaan sampah berbasis Zero Waste, proses ini terlihat dari langkah-langkah pemerintah daerah dalam merumuskan program Bank Sampah, membentuk regulasi daerah, atau membuat kebijakan pemilahan sampah di rumah tangga. Proses konversi ini

melibatkan aktor politik, birokrasi, serta stakeholder lain yang berkepentingan dalam isu pengelolaan lingkungan.

Ketiga, output adalah hasil nyata dari kebijakan yang telah dirumuskan. Output bisa berupa produk hukum (peraturan daerah atau keputusan wali kota), program pemerintah (TPS 3R, Bank Sampah), atau instrumen lain yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Output menjadi indikator sejauh mana pemerintah berhasil menindaklanjuti input yang datang dari masyarakat.

Keempat, feedback merupakan respon masyarakat terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Feedback bisa berupa dukungan, kritik, maupun evaluasi atas efektivitas kebijakan tersebut. Dalam konteks Zero Waste, feedback dapat berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, keaktifan dalam Bank Sampah, atau sebaliknya berupa kritik atas minimnya sarana prasarana yang disediakan pemerintah. Feedback ini kemudian akan kembali menjadi input baru yang memperkuat siklus kebijakan berikutnya.

Melalui kerangka ini, efektivitas program Zero Waste dapat dianalisis dengan melihat apakah input dari masyarakat benar-benar diakomodasi, sejauh mana proses konversi mampu menghasilkan kebijakan yang tepat, apakah output kebijakan memberikan manfaat nyata, serta bagaimana feedback masyarakat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas implementasi. Jika keempat unsur tersebut berjalan seimbang, maka siklus kebijakan publik akan terus berputar secara sehat dan efektivitas program Zero Waste dapat tercapai secara berkelanjutan.

2.2.3 Teori Tahapan Kebijakan (James Anderson, 2014)

James Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik berjalan melalui beberapa tahap, yaitu agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap agenda setting, isu pengelolaan sampah masuk ke prioritas pemerintah karena dianggap penting. Tahap formulasi mencakup perumusan alternatif kebijakan seperti pemilahan sampah, pembangunan TPS 3R, atau pemberdayaan Bank Sampah. Selanjutnya, tahap adopsi adalah pengambilan keputusan agar kebijakan memiliki kekuatan hukum. Implementasi adalah tahap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat, sementara evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kebijakan. Hambatan dalam kebijakan pengelolaan sampah biasanya muncul pada

tahap implementasi dan evaluasi, terutama karena keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan.

2.2.4 Konsep Zero Waste

Zero Waste merupakan sebuah pendekatan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meminimalkan timbulan sampah yang berakhir di TPA. Menurut Zero Waste International Alliance (2018), Zero Waste adalah desain dan pengelolaan produk serta proses untuk menghindari dan mengurangi volume serta toksisitas sampah, dengan melestarikan semua sumber daya melalui penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Konsep Zero Waste memandang sampah bukan sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali. Implementasi Zero Waste mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang barang bekas, serta memanfaatkan sampah organik menjadi kompos atau biogas. Dengan demikian, Zero Waste tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis pengelolaan, tetapi juga perubahan paradigma masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan.

2.2.5 Partisipasi Masyarakat

Secara umum, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan publik. Dalam pengelolaan sampah berbasis Zero Waste, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif warga dalam memilah sampah sejak dari rumah, memanfaatkan fasilitas Bank Sampah, serta berperilaku ramah lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti kepatuhan memilah sampah, keaktifan mengikuti kegiatan pengelolaan sampah, dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Tingginya tingkat partisipasi akan meningkatkan efektivitas program Zero Waste, sedangkan rendahnya partisipasi dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan.

2.2.6 Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

Efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada dukungan anggaran dan sarana prasarana sehingga menjadi aspek yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan dana yang memadai untuk penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, kegiatan sosialisasi, serta operasional sehari-hari program Zero Waste. Selain itu, sarana prasarana yang memadai seperti TPS 3R, Bank Sampah, tempat sampah terpilah, komposter, serta armada pengangkut sampah menjadi syarat penting agar program dapat berjalan. Tanpa adanya dukungan anggaran dan fasilitas yang cukup, kebijakan akan sulit diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

2.2.7 Efektivitas Implementasi Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Zero Waste, efektivitas implementasi dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat pengurangan sampah rumah tangga, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, ketersediaan serta pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah, dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah serta mengurangi sampah. Jika indikator-indikator tersebut menunjukkan hasil positif, maka dapat dikatakan kebijakan Zero Waste berhasil diimplementasikan dengan baik. Namun, jika hasilnya rendah, maka implementasi dianggap belum efektif dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep, teori, serta variabel penelitian yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah. Menurut Sugiyono (2017), kerangka pikir merupakan model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Dengan adanya kerangka pikir, peneliti dapat memetakan secara sistematis hubungan antar variabel serta memperjelas arah penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka pikir disusun dengan menggunakan analisis Fishbone (diagram tulang ikan). Fishbone diagram, yang pertama kali diperkenalkan oleh

Kaoru Ishikawa, merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi suatu permasalahan. Fishbone dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai kerangka ikan, di mana masalah utama ditempatkan pada bagian kepala ikan, sedangkan faktor-faktor penyebab digambarkan sebagai tulang-tulang kecil yang bercabang dari tulang besar. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan faktor-faktor penyebab secara lebih terstruktur sehingga memudahkan analisis terhadap akar permasalahan.

Faktor utama dalam penelitian ini adalah Efektivitas Implementasi Program Zero Waste. Efektivitas kebijakan dipahami sebagai sejauh mana tujuan program Zero Waste dapat tercapai sesuai target, misalnya pengurangan timbulan sampah rumah tangga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi penggunaan sarana prasarana yang tersedia. Tingkat efektivitas ini akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya yang ada dan sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam mendukung implementasi program.

Faktor pertama yang berperan sebagai penyebab adalah *Man*. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program Zero Waste. Masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dalam memilah sampah sejak dari rumah, sehingga sampah organik dan anorganik bercampur dan menyulitkan proses daur ulang. Selain itu, budaya konsumtif masyarakat perkotaan, seperti tingginya penggunaan plastik sekali pakai, turut memperparah timbulan sampah. Oleh karena itu, keberhasilan program Zero Waste sangat membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat melalui perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran lingkungan.

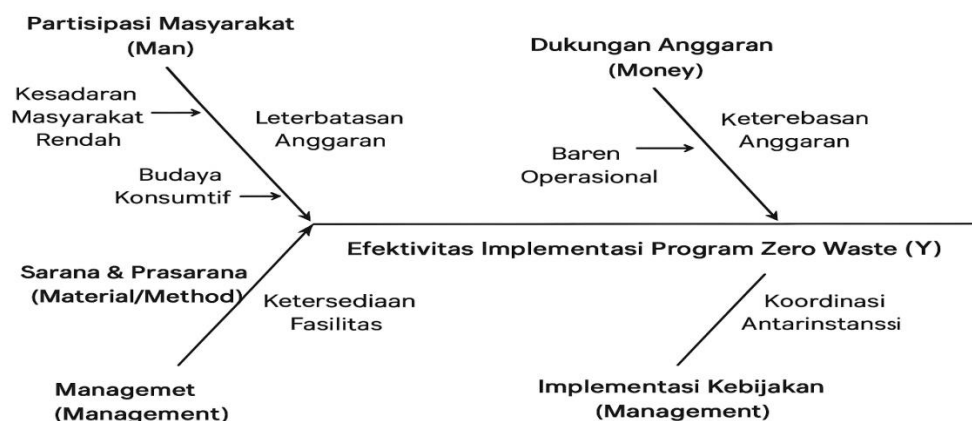
Faktor kedua adalah *Money* yaitu dukungan anggaran. Kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat berjalan tanpa dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah. Keterbatasan alokasi dana APBD sering kali menyebabkan pelaksanaan program Zero Waste tidak optimal. Biaya operasional untuk mendukung keberlangsungan Bank Sampah, TPS 3R, serta kegiatan sosialisasi masih terbatas, sehingga program tidak mampu menjangkau seluruh wilayah kota. Dengan demikian, besar kecilnya anggaran akan berpengaruh langsung pada efektivitas implementasi kebijakan.

Faktor ketiga adalah *Material/Method*, sarana prasarana menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program Zero Waste. Saat ini, ketersediaan fasilitas

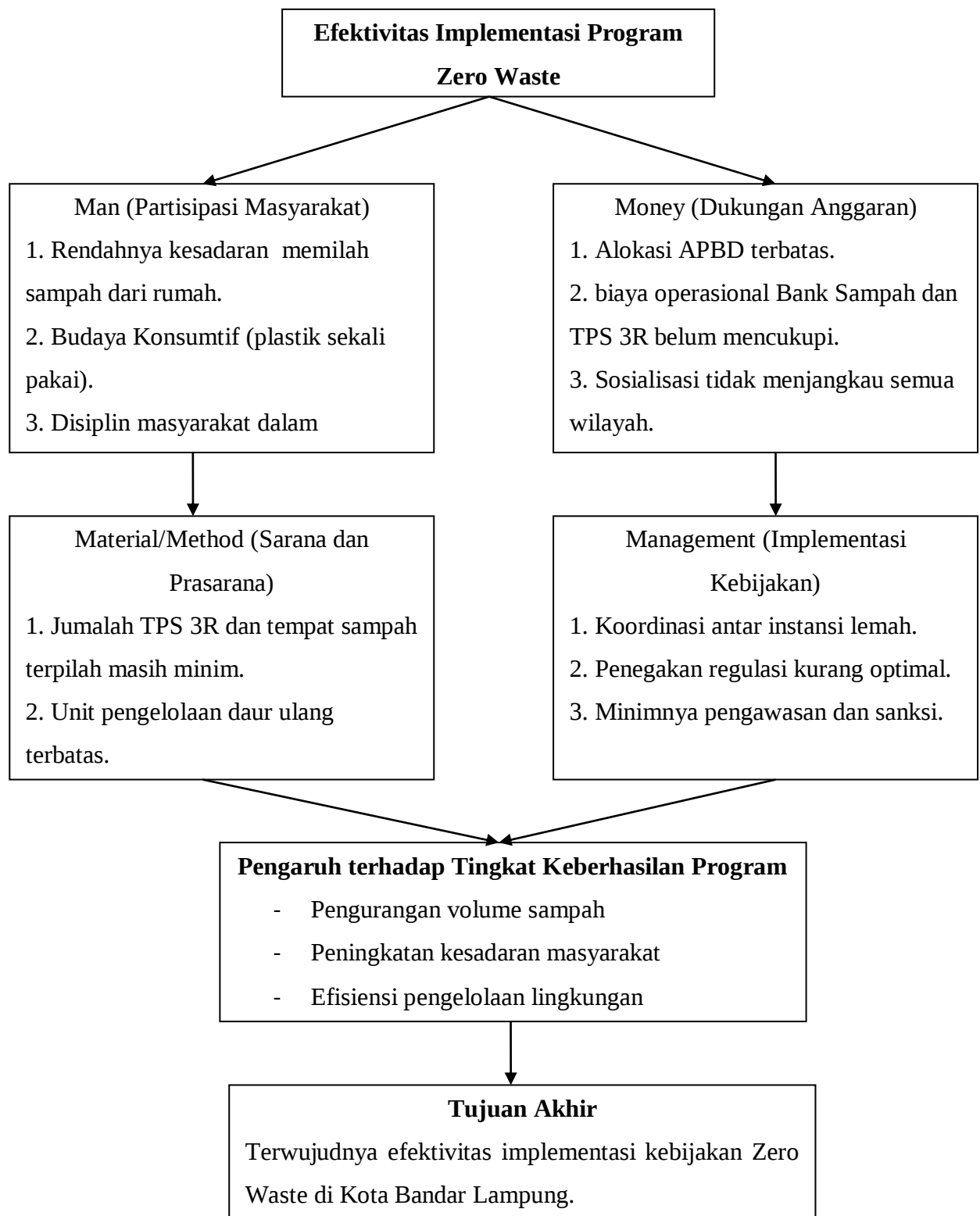
seperti TPS 3R, tempat sampah terpilah, dan unit pengolahan daur ulang masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari. Selain itu, armada pengangkut sampah juga masih belum memadai, sehingga distribusi sampah ke tempat pengolahan sering kali mengalami kendala. Keterbatasan ini berakibat pada rendahnya efektivitas implementasi kebijakan meskipun masyarakat sudah berusaha berpartisipasi.

Faktor keempat adalah *Management* (Implementasi Kebijakan). Dalam praktiknya, lemahnya koordinasi antar instansi seringkali menjadi penghambat. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana utama kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan dalam menjalin kerja sama yang solid dengan instansi lain, baik di tingkat pemerintah maupun dengan masyarakat. Selain itu, penegakan regulasi mengenai kewajiban memilah sampah belum berjalan optimal karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas. Manajemen kebijakan yang lemah ini berdampak pada belum maksimalnya hasil yang diharapkan dari program Zero Waste.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, sarana prasarana, dan manajemen kebijakan semuanya merupakan elemen penting yang harus diperhatikan secara simultan. Melalui kerangka berpikir berbasis Fishbone ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap efektivitas program, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pikir Fishbone



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

Gambar 2. Kerangka Pikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan publik mengenai program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengukur atau menghitung secara statistik, tetapi lebih menekankan pada interpretasi, pemahaman, serta penggambaran fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara langsung pengalaman, pandangan, dan persepsi para aktor yang terlibat dalam implementasi program Zero Waste, seperti aparatur pemerintah, pengelola Bank Sampah, masyarakat, serta komunitas lingkungan. Melalui wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, serta studi pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, sejauh mana efektivitasnya, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Dalam konteks ini, metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran nyata tentang kebijakan publik pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung, mulai dari aspek kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Hasil yang diperoleh bukan berupa angka-angka kuantitatif, melainkan berupa narasi mendalam yang menjelaskan kondisi empiris di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian kebijakan publik di bidang lingkungan, khususnya terkait isu pengelolaan sampah perkotaan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk menjadi arah sekaligus batasan dalam pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2023). Adapun fokus penelitian ini diarahkan pada kajian kebijakan publik mengenai program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung. Fokus tersebut dijabarkan dalam beberapa aspek berikut:

1. Kebijakan dan Tujuan Program
 - a. Terkait dengan isi dan arah kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste.
 - b. Standar dan sasaran yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut.
 - c. Hambatan yang muncul dalam penerapan kebijakan di tingkat masyarakat.
2. Pelaksanaan Program di Lapangan
 - a. Bentuk implementasi program Zero Waste oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah, dan komunitas masyarakat.
 - b. Keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah rumah tangga.
 - c. Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat
 - a. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana.
 - b. Dukungan kebijakan dan koordinasi antar organisasi dalam pelaksanaan program.
 - c. Faktor sosial, budaya, dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala implementasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada wilayah perkotaan yang menjadi pusat timbunan sampah rumah tangga. Secara lebih spesifik, penelitian dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, yang merupakan salah satu

wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan menghasilkan volume sampah rumah tangga cukup besar setiap harinya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Teluk Betung Selatan memiliki karakteristik sosial dan lingkungan yang relevan untuk dianalisis dalam konteks implementasi program Zero Waste. Penelitian dilakukan terutama pada lembaga terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, unit-unit Bank Sampah, TPS 3R, serta beberapa komunitas masyarakat dan rumah tangga yang sudah mulai menerapkan prinsip Zero Waste. Dengan demikian, lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang representatif mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara, observasi, maupun interaksi dengan responden. Dalam penelitian ini, Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi pustaka dengan berbagai pihak yang terkait dengan program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste. Informan utama dalam penelitian ini adalah pejabat atau staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, pengelola Bank Sampah, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, serta warga yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Data primer ini dipilih karena dapat menggambarkan pandangan, pengalaman, dan dinamika yang terjadi secara nyata di lapangan.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2019) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, baik berupa dokumen maupun catatan yang dipublikasikan. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan instansi, maupun publikasi akademik. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pengelolaan Sampah, serta laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2023–2024 mengenai data timbulan sampah harian (DLH Kota Bandar Lampung, 2024). Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari penelitian terdahulu, artikel jurnal, serta pemberitaan media massa yang membahas permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data mencakup serangkaian metodologi yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2018). Penelitian ini menggunakan beberapa metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, serta studi pustaka. Pemilihan teknik ini dilakukan karena masing-masing metode dapat saling melengkapi sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung.

a. Wawancara

Moleong (2018) menjelaskan wawancara sebagai bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara berfungsi sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami pandangan, pengalaman, serta persepsi para informan yang terlibat secara langsung.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Jabatan	Nama	Informasi

1.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung	Yusnadi Feriyanto	a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung. b. Strategi dan program yang dijalankan DLH dalam mendukung pengurangan timbulan sampah rumah tangga. c. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Zero Waste. d. Koordinasi antarinstansi dan peran masyarakat dalam pelaksanaan program.
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung	Ilham Durmanwan, S.T., M.Si.	a. Kebijakan dan regulasi lingkungan yang mendukung implementasi program Zero Waste. b. Integrasi program Zero Waste dalam

			kebijakan tata lingkungan kota. c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran dalam implementasi kebijakan. d. Evaluasi efektivitas kebijakan lingkungan berbasis Zero Waste.
3.	Ketua Bank Sampah Emak.id, Binaan DLH Kota Bandar Lampung	Agus Solihin	a. Mekanisme operasional Bank Sampah dalam mendukung program Zero Waste. b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. c. Tantangan yang dihadapi Bank Sampah dalam menjalankan kegiatan daur ulang. d. Kolaborasi dengan DLH dan pihak lain dalam pelaksanaan

			program lingkungan.
4.	Founder Komunitas Gajahlah Kebersihan, Kota Bandar Lampung	Edy Fajar Prasetyo	a. Peran komunitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Zero Waste. b. Kegiatan edukasi dan kampanye lingkungan yang dilakukan oleh komunitas. c. Hambatan sosial dan budaya dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. d. Sinergi antara komunitas, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program Zero Waste.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2007), observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana masyarakat melakukan pemilahan sampah, aktivitas di TPS 3R dan Bank

Sampah, serta kendala yang muncul dalam implementasi program Zero Waste. Observasi ini memperkuat data hasil wawancara karena memberikan bukti empiris di lapangan.

Tabel 3. Daftar Observasi

No	Objek	Informasi
1.	Aktivitas di TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle)	Pengamatan mengenai proses pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh petugas serta efektivitas operasional TPS 3R di wilayah Teluk Betung Selatan.
2.	Kegiatan di Bank Sampah Emak.id Bandar Lampung	Mengamati proses penimbangan, pencatatan, dan pengelolaan sampah anorganik yang dilakukan oleh pengelola dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan daur ulang.
3.	Lingkungan permukiman masyarakat di Teluk Betung Selatan	Melihat secara langsung perilaku warga dalam memilah sampah dari sumbernya, serta tingkat partisipasi mereka terhadap program Zero Waste yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
4.	Kegiatan sosialisasi atau edukasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung	Mengamati bentuk kegiatan edukasi, metode penyampaian pesan lingkungan, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam program penyadaran

		tentang pengelolaan sampah.
--	--	-----------------------------

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

c. Dokumentasi

Sugiyono (2007) mendefinisikan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan tertulis, arsip, foto, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Berikut tabel dokumen yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Dokumen Penelitian

No	Dokumen	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah	Landasan hukum pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung.
2.	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas)	Arah kebijakan nasional yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menerapkan program Zero Waste serta target pengurangan timbulan sampah rumah tangga.
3.	Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung Tahun 2024–2025	Data mengenai jumlah timbulan sampah rumah tangga, capaian pengurangan sampah, jumlah TPS 3R aktif, dan jumlah Bank Sampah binaan DLH di wilayah Kota Bandar

		Lampung.
4.	Data Statistik DLH dan BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2025	Informasi mengenai persentase masyarakat yang memilah sampah, tingkat partisipasi masyarakat dalam program Zero Waste, dan perkembangan infrastruktur pengelolaan sampah di Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

d. Studi Pustaka

Menurut Bungin (2008), studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur, buku, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian. Studi pustaka berfungsi memberikan dasar teoritis yang kuat serta memperkaya analisis dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori kebijakan publik dan konsep Zero Waste, serta memahami bagaimana praktik serupa dijalankan di daerah lain sebagai bahan pembandingan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses bekerja dengan data berupa teks atau narasi, bukan angka, sehingga diperlukan interpretasi untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif dengan memperhatikan keterkaitan antar proses. Model analisis interaktif ini meliputi empat langkah utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keempat langkah tersebut berlangsung secara terus-menerus (iteratif) hingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

a. Pengumpulan Data

Tahap awal dalam analisis adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maupun studi pustaka. Data yang diperoleh pada tahap ini bersifat mentah dan masih perlu diolah lebih lanjut. Tujuan pengumpulan data adalah memperoleh informasi yang seluas mungkin terkait implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Bandar Lampung.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang sangat banyak dapat dipadatkan menjadi lebih sistematis. Reduksi ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema penting terkait kebijakan pengelolaan sampah berbasis Zero Waste.

c. Penyajian Data

Setelah direduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, maupun diagram. Penyajian data bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami, serta mempermudah peneliti dalam melihat pola hubungan antar temuan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan menyertakan kutipan hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang mendukung.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah disajikan diinterpretasikan untuk menemukan makna yang sesuai dengan fokus penelitian. Agar kesimpulan yang dihasilkan lebih valid, peneliti melakukan verifikasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber. Dengan demikian, kesimpulan penelitian benar-benar didasarkan pada kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2019), terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data, yaitu uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Masing-masing metode dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas Data (*Credibility*)

Uji Kredibilitas (*Credibility*) bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, peneliti memperpanjang observasi dengan melakukan pengamatan lebih lama di lokasi penelitian, seperti di Bank Sampah, TPS 3R, maupun komunitas lingkungan, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam. Kedua, peneliti berupaya meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengecekan ulang secara teliti agar informasi yang diperoleh tidak menimbulkan kesalahan tafsir. Ketiga, dilakukan triangulasi, baik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari DLH, pengelola Bank Sampah, dan masyarakat; triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka; maupun triangulasi waktu dengan melakukan pengambilan data pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kasus negatif, yakni membandingkan data yang mendukung dengan data yang berbeda atau bahkan bertentangan guna memperoleh gambaran yang lebih objektif. Selanjutnya, digunakan pula bahan referensi seperti foto, dokumen resmi, dan catatan lapangan sebagai bukti pendukung. Terakhir, peneliti melakukan member check dengan meminta konfirmasi ulang dari informan terhadap hasil wawancara untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Untuk itu, peneliti menyajikan deskripsi penelitian secara rinci, mulai dari latar belakang, lokasi, hingga proses implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Bandar Lampung. Dengan deskripsi yang jelas, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang serupa di daerah lain.

c. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berhubungan dengan konsistensi data. Uji ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, teknik pengumpulan data, hingga analisis. Dalam konteks ini, dosen pembimbing berperan sebagai auditor yang memeriksa konsistensi langkah-langkah penelitian agar sesuai dengan prosedur ilmiah.

d. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas menekankan pada objektivitas data. Artinya, data yang diperoleh harus benar-benar didasarkan pada temuan di lapangan, bukan hasil rekayasa atau pandangan subjektif peneliti. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dijaga dengan cara mendokumentasikan setiap temuan melalui catatan lapangan, rekaman wawancara, foto, maupun dokumen resmi, sehingga dapat diverifikasi kembali apabila diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking: An Introduction (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bang, H. P. (2020). *David Easton's political systems analysis*. In M. Bevir & R. A. W. Rhodes (Eds.), *The SAGE handbook of political science* (pp. 217–231).
- Bungin, B. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy (14th ed.)*. New Jersey: Pearson.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: UMJ PRESS.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Magfirah, S. (2023). Tantangan penerapan gaya hidup zero waste skala rumah tangga di indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science 2 (07)*, 511-522.
- Putri, R. D., & Kurniawan, T. (2021). Inovasi Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Zero Waste di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145–160.

- Sujatmiko, C., Juwita, F., & Wisnaningsih, W. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bagi Warga Di Kelurahan Bakung Kota Bandar Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)* 3 (02), 104-113.
- Supinganto, A., dkk. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga Secara Mandiri. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5 (4), 1760-1768.
- Suryani, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 25–36.
- Yuniarto, H. A., Akbari, A. D., & Masruroh, N. A. (2013). Perbaikan pada fishbone diagram sebagai root cause analysis tool. *Jurnal Teknik Industri*, 3(3), 174–184.

Sumber Lainnya:

- DLH Kota Bandar Lampung. (2024). Laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2023–2024. Bandar Lampung: DLH Kota Bandar Lampung.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. (2024). Jumlah timbulan sampah di Kota Bandar Lampung (2011–2023). DLH Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Pengelolaan Sampah*. (2023). Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Jakstranas). (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210.